



PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran)

Issn Cetak : 2599-1914 | Issn Online : 2599-1132 | Vol. 8 No. 1 (2025) | 101-110

DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v8i1.101-110>

MODEL-MODEL PENDANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muhammad Adnan Fahrezi*, Muhamad Pandu Maulana,
Muhammad Salman Nurwahid, Aprilliantoni

Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam 45 Bekasi,
Indonesia.

*e-mail: fahrezi171239@gmail.com

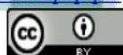


Abstrak. Peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas sistem pendidikan Indonesia adalah pendanaan pendidikan. Dianggap paling efisien untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan adalah model pendanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Dengan menggunakan tinjauan literatur dari para ahli, artikel ini menyelidiki berbagai model pendanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendanaan pemerintah, yang bersumber dari APBN dan APBD, tetap menjadi pilar utama, meskipun sering menghadapi masalah dengan pembagian yang tidak merata. Selain menimbulkan risiko komersialisasi pendidikan, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan yang tidak dapat dipenuhi pemerintah. Dimungkinkan untuk meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dan keterlibatan langsung di tingkat sekolah. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi berbagai sumber pendanaan dapat meningkatkan kualitas pendidikan jika dikelola secara adil dan akuntabel. Namun, untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan, tantangan utama yang perlu diselesaikan termasuk masalah pengelolaan yang tidak transparan dan ketidakmerataan dana.

Kata Kunci: Pendanaan Pendidikan di Indonesia.

Abstract. Education finance has a critical role in guaranteeing the durability and calibre of the Indonesian educational system. The community, business sector, and government all contribute to a funding model that is thought to be the most effective approach to meet the needs for financing education. This article explores Indonesia's varied education funding schemes through an expert literature review. The primary pillar is still government support, which comes from the APBN and APBD, notwithstanding issues with uneven distribution that frequently arise. In addition to posing threats to the commercialisation of education, the private sector is crucial in completing the gaps left by the government. With community involvement in the form of donations and direct involvement at the school level, it is feasible to raise the sense of ownership and accountability in the management of education funds. A qualitative descriptive technique and literature review were used to perform this study. According to the study's findings, if different financing sources are combined and handled properly and responsibly, educational quality can be raised. Nonetheless, problems with opaque management and uneven finance must be addressed in order to build a more equitable and long-lasting educational system.

Keywords: Education Funding in Indonesia.



PENDAHULUAN

Keberlangsungan dan kualitas pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada pendanaan pendidikan. Pendanaan yang cukup dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional karena merupakan bagian penting dari sistem pendidikan. Pendanaan pendidikan dalam konteks ini tidak hanya mencakup alokasi anggaran untuk infrastruktur dan operasional sekolah, tetapi juga investasi dalam kurikulum, program peningkatan kapasitas siswa, dan kualitas guru. Tanpa sistem pendanaan yang memadai, tujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas akan sulit dicapai. Pendanaan pendidikan di Indonesia menjadi semakin mendesak seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Menurut Suharsaputra (2020), masalah terbesar yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia adalah bagaimana anggaran didistribusikan secara tidak merata dan berapa banyak dana yang dialokasikan untuk pendidikan di daerah terpencil (Suharsaputra, "Manajemen Pendidikan", hal. 47). Kondisi ini menyebabkan perbedaan besar dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Selain itu, kekurangan dana untuk pendidikan juga berdampak langsung pada fasilitas pendidikan yang tidak memadai, tingkat kesejahteraan guru yang rendah, dan kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk membangun kurikulum yang berkualitas tinggi. Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam bersaing secara global, terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia, jika masalah ini tidak

segera diselesaikan. Dalam hal pengembangan pendidikan yang berkelanjutan, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain jika tidak ada dana yang memadai. Ini dapat menyebabkan sistem pendidikan nasional tidak dapat memenuhi standar pendidikan internasional, yang dapat memperburuk masalah pengangguran dan kemiskinan di masa depan. Sangat berbahaya jika masalah pendanaan pendidikan tidak segera diselesaikan.

Pertama dan terpenting, di daerah yang kurang berkembang, pendidikan akan terus tertinggal dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. Kesimpangan ini dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih serius, seperti kesenjangan ekonomi dan kurangnya kesempatan pendidikan yang merata di seluruh masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Wibowo (2022), kurangnya akses ke pendidikan memengaruhi ketidakadilan sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan (Wibowo, "Tantangan Pendidikan di Indonesia", hal. 79).

Kedua, sistem pendidikan akan tetap bergantung pada sumber daya pemerintah yang terbatas jika tidak ada sistem pendanaan yang efektif. Kondisi ini membuat pendidikan di Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah dan fluktuasi ekonomi. Seringkali, sektor pendidikan adalah salah satu yang pertama terkena dampak tekanan pada anggaran negara. Situasi ini menyebabkan perencanaan dan pengelolaan pendidikan tidak stabil. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi terhambat.

Ketiga, kesejahteraan rendah guru dan staf pendidikan juga dipengaruhi oleh pendanaan pendidikan yang tidak memadai. Karena guru tidak menerima insentif, motivasi mereka untuk mengajar menurun, yang pada gilirannya berdampak pada

kualitas pembelajaran di kelas. Menurut Rahman (2022), guru yang tidak menerima dukungan keuangan yang memadai cenderung mengalami kelelahan, yang berdampak langsung pada hasil belajar siswa (Rahman, "Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan," hlm. 125). Studi telah dilakukan tentang model pendanaan pendidikan di Indonesia dari perspektif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Karya Mulyasa (2019), yang menjelaskan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan pendidikan, adalah penelitian yang paling signifikan (Mulyasa, "Pengelolaan Pendidikan", hlm. 115). Menurut Mulyasa, pendanaan pendidikan harus melibatkan masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pendanaan yang berkelanjutan. Studi lain oleh Arifin (2021) menekankan pentingnya kerja sama pemerintah-swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui dana publik-swasta. Arifin menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan dapat berdampak positif pada inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan. Namun, ia juga mengingatkan tentang risiko komersialisasi pendidikan jika partisipasi swasta tidak diatur dengan baik (Arifin, "Ekonomi Pendidikan", hal. 94). Selain itu, Wibowo (2022) menyelidiki perbedaan dalam pembagian dana pendidikan di antara daerah dan menekankan bahwa salah satu masalah utama sistem pendanaan pendidikan Indonesia adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, terutama di tingkat daerah (Wibowo, "Tantangan Pendidikan di Indonesia," hal.81). Meskipun penelitian tersebut telah meningkatkan pemahaman kita tentang model pendanaan pendidikan,

ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki.

Pertama, penelitian sebelumnya biasanya berfokus pada aspek makro dari pendanaan pendidikan, seperti kontribusi sektor swasta dan kebijakan nasional. Namun, penelitian ini kurang memperhatikan aspek mikro, seperti bagaimana pendanaan dikelola di tingkat sekolah dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di kelas.

Kedua, penelitian sebelumnya seringkali hanya menekankan sumber pendanaan tetapi tidak membahas secara menyeluruh bagaimana dana digunakan. Salah satu contohnya adalah bagaimana pengelolaan dana berjalan di sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri yang dibiayai pemerintah. Studi tentang bagaimana berbagai model pendanaan mempengaruhi hasil belajar siswa secara langsung kurang.

Ketiga, meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam alokasi dana, solusi yang ditawarkan masih umum dan belum ada rekomendasi spesifik yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak banyak membahas metode untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan penelitian yang ada di Indonesia tentang model pendanaan pendidikan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat lebih dekat bagaimana model pendanaan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat diterapkan secara efektif di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian ini juga meneliti bagaimana pendanaan dikelola di tingkat sekolah dan bagaimana hal itu

berdampak pada kualitas pembelajaran siswa.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menemukan masalah utama dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia dan membuat saran kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem pendanaan pendidikan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan model pendanaan yang berkelanjutan dan inklusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan akses ke pendidikan.

Pendanaan pendidikan adalah istilah yang mengacu pada pembagian sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung sistem pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Pendanaan pendidikan mencakup berbagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti gaji guru, perbaikan infrastruktur, pembelian buku dan alat pembelajaran, dan pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar (Mulyasa, *Pengelolaan Pendidikan*, 2019). Pendanaan juga termasuk biaya administrasi dan operasional sekolah. Hal ini sangat penting untuk menjamin pendidikan yang efisien dan efektif di seluruh jenjang (Suharsaputra, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 55).

Kebijakan pendidikan Indonesia didanai dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan donasi dari sektor publik dan swasta. Model pendanaan ini sangat beragam dan bervariasi tergantung pada struktur sosial-ekonomi masing-masing daerah. Model pendanaan pendidikan yang beragam, sebagaimana disebutkan oleh Arifin (2021), memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana,

tetapi juga menyebabkan ketimpangan dalam akses ke pendidikan di berbagai wilayah (Arifin, *Ekonomi Pendidikan*, hlm. 85).

Tiga model utama terdiri dari dana pendidikan di Indonesia: dana pemerintah, dana swasta, dan dana partisipatif masyarakat. Masing-masing model memiliki fitur, keuntungan, dan masalah yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesetaraan pendidikan. 1) Pendanaan Pemerintah. Sistem pendidikan nasional bergantung pada dana pemerintah. Sekitar 20% dari APBN dan APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan oleh pemerintah Indonesia. Pendanaan ini digunakan untuk mendanai sekolah negeri dan berbagai program pendidikan, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dirancang untuk mengurangi biaya operasional sekolah. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pendidikan, Wibowo (2022) menyatakan bahwa dana tersebut masih tidak merata di berbagai wilayah. Menurut Wibowo (*Tantangan Pendidikan di Indonesia*, hlm. 78), daerah terpencil seringkali menerima anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah perkotaan. Akibatnya, kualitas pendidikan di daerah tersebut menjadi lebih rendah.

Selain itu, ada pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pemerintah. Banyak sekolah di daerah-daerah yang masih menghadapi masalah untuk mendapatkan dana BOS secara tepat waktu, yang menghambat proses pendidikan (Harsono, *Manajemen Dana Pendidikan*, hlm. 92). Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada pendanaan pemerintah menempatkan sistem pendidikan dalam bahaya, terutama saat terjadi perubahan

kebijakan atau krisis ekonomi yang mengurangi anggaran. 2) Pendanaan swasta. Pendanaan swasta sangat penting untuk memenuhi kekurangan dana pemerintah. Sekolah swasta dan lembaga pendidikan non-formal seringkali bergantung pada donasi yayasan, donasi perusahaan, atau sponsor individu untuk membayar mereka. Menurut Arfin (2021), sektor swasta memiliki kemampuan untuk memberikan fleksibilitas dan inovasi dalam manajemen pendidikan, terutama untuk institusi pendidikan yang didirikan oleh yayasan keagamaan atau filantropi (Arifin, *Ekonomi Pendidikan*, hlm. 87). Namun, ada risiko yang harus diantisipasi dari komersialisasi pendidikan. Dengan meningkatnya keterlibatan sektor swasta, pendidikan mungkin semakin berfokus pada keuntungan, yang dapat mengorbankan prinsip keadilan sosial dalam akses pendidikan. Menurut Rahman (2022), orang-orang dari kelompok menengah ke atas seringkali tidak memiliki akses ke sekolah-sekolah swasta yang bagus. Sebaliknya, orang-orang dari kelompok miskin harus bergantung pada sekolah negeri dengan fasilitas dan kualitas yang lebih rendah (Rahman, *Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, hlm. 121). 3) Partisipasi Masyarakat dalam Pendanaan. Model pendanaan partisipatif mengacu pada kontribusi masyarakat dalam mendanai operasional dan pengembangan sekolah. Bentuk partisipasi ini meliputi sumbangan sukarela dari orang tua siswa, iuran komite sekolah, serta donasi dari organisasi masyarakat setempat. Menurut Purwanto (2023), partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan memiliki dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi, partisipasi ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab

masyarakat terhadap keberlangsungan pendidikan di lingkungannya. Di sisi lain, ada risiko ketergantungan berlebihan pada masyarakat, terutama di daerah yang secara ekonomi lemah, yang justru menambah beban bagi keluarga miskin (Purwanto, *Model Kebijakan Pendidikan*, hlm. 38).

Pendanaan pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa masalah utama. Ini termasuk alokasi dana yang tidak merata, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dana, dan rendahnya partisipasi sektor swasta di beberapa wilayah. Selama bertahun-tahun, ada ketidaksesuaian dalam pembagian dana pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2022), ketimpangan ini disebabkan oleh geografi, infrastruktur yang kurang, dan perbedaan kemampuan fiskal antara pemerintah daerah (Wibowo, *Tantangan Pendidikan di Indonesia*, hlm. 81).

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi masalah yang signifikan. Menurut Harsono (2023), proses penyaluran dana pendidikan seringkali tidak diawasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuannya (Harsono, *Manajemen Dana Pendidikan*, hlm. 94). BOS dan beasiswa untuk siswa kurang mampu, antara lain, dipengaruhi oleh kurangnya akuntabilitas ini.

Selain itu, sektor swasta masih kurang terlibat dalam pendanaan pendidikan di daerah perkotaan dan lembaga pendidikan elit, tetapi sangat sedikit di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses ke pendidikan berkualitas tinggi, dengan dukungan swasta hanya

tersedia untuk sekolah-sekolah di wilayah maju.

Serangkaian studi telah dilakukan untuk menyelidiki model pendanaan pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mulyasa (2019), yang membahas pentingnya diversifikasi sumber pendanaan pendidikan dengan memasukkan lebih banyak sektor swasta dan partisipasi masyarakat (Mulyasa, *Pengelolaan Pendidikan*, hlm. 113). Penelitian lain oleh Arifin (2021) menekankan peran sektor swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui skema pendanaan publik-swasta yang lebih kolaboratif (Arifin, *Ekonomi Pendidikan*, hlm. 93).

Meskipun penelitian ini telah memberikan pengetahuan penting tentang model pendanaan pendidikan, ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Seringkali, penelitian hanya berfokus pada elemen makro, seperti kebijakan pendanaan nasional, tetapi tidak menyelidiki lebih jauh bagaimana model pendanaan ini mempengaruhi manajemen dana di tingkat sekolah.

Salah satu kelemahan dari penelitian terdahulu adalah kurangnya perhatian terhadap evaluasi efektivitas penggunaan dana di sekolah. Sebagai contoh, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana pengelolaan dana pendidikan di tingkat lokal berdampak pada hasil belajar siswa. Selain itu, meskipun keterlibatan sektor swasta sering disarankan, belum banyak penelitian yang mengevaluasi potensi risiko komersialisasi pendidikan akibat meningkatnya peran sektor swasta dalam pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai model pendanaan pendidikan di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan distribusi dana, meningkatkan transparansi, dan

melibatkan lebih banyak sektor swasta tanpa mengorbankan akses masyarakat miskin ke pendidikan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi nyata untuk upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Penelitian kajian pustaka merupakan bentuk analisis data konseptual dari berbagai sumber ilmiah yang terbit. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai tuntunan dalam mengkaji masalah penelitian.

Studi pustaka ini dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki variasi ekonomi dan geografis, termasuk perkotaan, pedesaan, dan terpencil. Penelitian ini melibatkan lima provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang distribusi dan model pendanaan pendidikan di berbagai konteks wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang dilakukan di lima provinsi di Indonesia, ada tiga sumber utama pendanaan untuk pendidikan: APBN/APBD (58%), kontribusi sektor swasta (25%), dan partisipasi masyarakat (17%). Dana pemerintah dari APBN dan APBD mencakup dana operasional dasar sekolah, program BOS, dan dana khusus untuk infrastruktur dan pengembangan kualitas pendidikan.

Dibandingkan dengan daerah pedesaan dan terpencil, yang sebagian besar bergantung pada APBN/APBD,

kontribusi sektor swasta lebih kecil di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta. Karena keterlibatan sektor swasta yang rendah di daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat, partisipasi masyarakat, terutama dalam bentuk iuran sukarela, sangat penting.

Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan kepala sekolah dan staf administrasi menunjukkan bahwa program BOS seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sekolah. Sebagian besar kepala sekolah mengatakan bahwa pencairan dana BOS sering tertunda, yang mengganggu operasi sekolah. Seorang kepala sekolah di Kalimantan Tengah menyatakan, "Dana BOS membantu untuk menutup biaya operasional rutin, namun sering kali kami terpaksa menunda kegiatan tertentu karena dana yang tidak turun tepat waktu." Sebaliknya, kepala sekolah di provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa dana BOS menjadi tambahan yang bermanfaat, tetapi tidak menjadi sumber pendanaan utama karena pihak swasta terlibat dalam mendukung infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Di daerah perkotaan, sekolah negeri dan swasta lebih mampu menggunakan kombinasi dana dari berbagai sumber, tetapi di daerah pedesaan dan terpencil, mereka sangat bergantung pada BOS.

Di kota-kota, sektor swasta memainkan peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Perusahaan, organisasi filantropi, dan yayasan pendidikan secara teratur memberikan donasi kepada sekolah-sekolah di Jakarta dan Jawa Barat. Terutama, fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan program beasiswa ditingkatkan dengan bantuan ini. "Kami mendapat banyak dukungan dari perusahaan besar yang mendanai

laboratorium komputer, sehingga siswa kami bisa belajar dengan fasilitas yang baik," kata salah satu responden dari sekolah swasta di Jakarta.

Namun, di wilayah pedesaan dan terpencil, keterlibatan sektor swasta sangat rendah. Misalnya, sekolah-sekolah di Papua dan NTB jarang menerima donasi dari perusahaan atau yayasan. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan antara kota dan pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. Di daerah perkotaan, partisipasi lebih sukarela dan biasanya terkait dengan program tertentu, seperti pembangunan fasilitas tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler. Di daerah pedesaan dan terpencil, seperti di Papua dan NTB, fokus partisipasi masyarakat lebih pada kebutuhan dasar untuk beroperasi sekolah. "Kami terkadang harus menyumbang untuk keperluan sekolah, seperti membeli kapur tulis atau perbaikan bangku yang rusak, karena dana dari pemerintah tidak mencukupi," kata salah seorang orang tua di Papua.

Selain membantu sekolah beroperasi, keterlibatan masyarakat ini menambah beban bagi keluarga miskin di daerah terpencil. Memastikan akses yang sama ke pendidikan berkualitas menjadi tantangan tersendiri.

B. Pembahasan

Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam pendanaan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dan antara wilayah maju dan tertinggal. Daerah terpencil seperti Papua dan NTB sangat bergantung pada dana pemerintah yang seringkali tidak memadai, sementara

daerah perkotaan seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat lebih mudah mendapatkan dana dari berbagai sumber, termasuk dari sektor swasta. Ini memperkuat temuan penelitian Arifin (2021), yang menyatakan bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh distribusi anggaran yang tidak merata dan kapasitas fiskal yang tidak seimbang di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pendidikan di daerah perkotaan, tetapi daerah terpencil memiliki sumber daya yang lebih sedikit (Arifin, *Ekonomi Pendidikan*, hlm. 87).

Ketidaksesuaian ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima siswa di berbagai daerah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali tidak memiliki fasilitas penting seperti buku pelajaran, alat peraga, dan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, hasil belajar siswa terpengaruh.

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan selain ketimpangan pendanaan juga menjadi perhatian utama. Sebagai hasil dari wawancara dengan kepala sekolah di berbagai wilayah, ditemukan bahwa pengelolaan dana BOS seringkali tidak jelas, baik dalam hal pencairan maupun penggunaannya. Kegiatan operasional sekolah sering terganggu oleh keterlambatan pencairan dana, terutama di daerah terpencil.

Harsono (2023) menyatakan bahwa kekurangan pengawasan yang efektif membuat pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah sering terabaikan. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan dana dan penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah (Harsono, *Manajemen Dana Pendidikan*, hlm. 94).

Selain itu, ketidakjelasan menyebabkan masyarakat tidak

mengawasi penggunaan dana sekolah. Sebagian besar orang yang menjawab mengatakan mereka tidak tahu secara pasti bagaimana dana sekolah digunakan. Namun, mereka sering diminta untuk memberikan sumbangan melalui iuran atau sumbangan sukarela. Untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengelolaan dana harus transparan.

Dalam hal pendanaan pendidikan, sektor swasta memiliki dua aspek yang saling melengkapi. Sebaliknya, sektor swasta memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya tambahan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di institusi pendidikan yang terletak di perkotaan. Sekolah swasta dan negeri di Jakarta dan Jawa Barat telah memperoleh keunggulan di tingkat nasional dan bahkan internasional berkat dukungan sektor swasta dalam bentuk donasi untuk infrastruktur, fasilitas, dan program beasiswa.

Di sisi lain, ketidakseimbangan dalam partisipasi sektor swasta menyebabkan ketimpangan baru dalam akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Sekolah-sekolah di daerah terpencil biasanya tidak mendapatkan dukungan dari sektor swasta, jadi mereka hanya bergantung pada dana pemerintah. Menurut Rahman (2022), perlu diperhatikan bahaya komersialisasi pendidikan karena dapat mengubah tujuan pendidikan dari pelayanan publik ke industri yang berfokus pada keuntungan (Rahman, *Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, hal. 121).

Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan yang mendorong sektor swasta untuk terlibat lebih aktif di wilayah tertinggal. Hal ini dapat dicapai melalui insentif pajak atau program

Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih berfokus pada pembangunan sekolah di wilayah terpencil. Salah satu cara untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah adalah melalui partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah di beberapa wilayah pedesaan dapat membantu kelangsungan kegiatan sekolah. Orang-orang dapat berpartisipasi dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan ekstrakurikuler atau iuran komite sekolah. Temuan penelitian ini, bagaimanapun, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di daerah terpencil lebih penting daripada inisiatif. Untuk menutupi kekurangan dana operasional yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, sekolah-sekolah di wilayah terpencil sering meminta bantuan masyarakat.

Menurut Suharsaputra (2020), partisipasi masyarakat yang efektif memerlukan komunikasi yang efektif dan transparansi antara sekolah dan orang tua siswa. Namun, masyarakat di daerah terpencil sering kali merasa terbebani dengan permintaan terus-menerus untuk sumbangan, sementara kualitas pendidikan anak-anak mereka tidak mengalami peningkatan yang signifikan (Suharsaputra, Manajemen Pendidikan, hlm. 55).

Untuk menyelesaikan masalah ini, kebijakan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan harus diubah. Ini harus memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab utama untuk menyediakan dana untuk operasional sekolah, terutama di wilayah tertinggal.

Studi ini menemukan beberapa solusi untuk masalah pendanaan pendidikan di Indonesia: 1) Reformasi

distribusi anggaran: Untuk mengurangi disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, pemerintah harus mempertimbangkan reformasi distribusi anggaran pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal dapat dibantu jika lebih banyak dana dialokasikan untuk mereka. 2) Transparansi dan akuntabilitas: Pengelolaan dana BOS dan sumber pendanaan lainnya di tingkat sekolah harus lebih terbuka. Untuk memastikan dana digunakan dengan benar, pemerintah dan masyarakat harus terlibat dalam proses pengawasan. 3) Mendorong keterlibatan sektor swasta di daerah terpencil: Pemerintah harus mendorong bisnis untuk berinvestasi dalam pendidikan di daerah yang kurang berkembang, seperti dengan memberikan insentif pajak atau kebijakan CSR. 4) Partisipasi masyarakat yang lebih berkelanjutan: Metode yang lebih transparan dan adil harus digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Sumbangan dari masyarakat seharusnya memberikan dukungan tambahan yang berkelanjutan daripada menggantikan dana operasional pemerintah.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pendanaan yang diterapkan pemerintah belum mencapai hasil yang optimal di lapangan. Ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya di lapangan dan alokasi anggaran yang diharapkan merupakan masalah utama. Salah satu masalah utama kebijakan pendidikan Indonesia, menurut Tilaar (2019), kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang sering menyebabkan ketidaksesuaian dalam pembagian anggaran untuk pendidikan, terutama di daerah

terpencil (Manajemen Pendidikan Nasional, hal. 101).

Selain itu, pemerintah seringkali gagal menyeimbangkan alokasi dana pendidikan di berbagai wilayah. Fakta ini diperkuat oleh penemuan Moeliodihardjo (2018), yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus pendidikan sulit diakses di banyak daerah tertinggal karena infrastruktur teknologi yang tidak merata dan sumber daya manusia yang terbatas (Pembangunan Pendidikan di Indonesia, hlm. 45).

Selain itu, Sudjana (2020) menyatakan bahwa ada potensi untuk mengembangkan sistem pendanaan partisipatif di beberapa area. Namun, untuk memastikan partisipasi yang efektif, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan transparansi yang baik (Manajemen Pembiayaan Pendidikan, hlm. 62). Oleh karena itu, keterbatasan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan pendidikan harus diubah agar lebih sesuai dengan keadaan daerah tertinggal.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa model pendanaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah besar, terutama dalam hal perbedaan antara perkotaan dan pedesaan serta wilayah maju dan tertinggal. Daerah terpencil sangat bergantung pada dana pemerintah seperti BOS, yang menyebabkan masalah seperti keterlambatan pencairan dan pengelolaan yang tidak transparan. Sebaliknya, di daerah pedesaan dan terpencil, keterlibatan sektor swasta sangat rendah, yang memperparah ketimpangan pendidikan. Ini terjadi meskipun sangat membantu di daerah perkotaan.

Meskipun partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan sangat penting di beberapa wilayah pedesaan karena mereka harus menutupi kekurangan operasional yang seharusnya disediakan pemerintah, daerah perkotaan mampu memanfaatkan berbagai sumber dana, baik pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Rekomendasi utama dari studi ini adalah reformasi distribusi anggaran yang lebih adil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, dan insentif bagi sektor swasta untuk berpartisipasi lebih banyak di wilayah terpencil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuat sistem pendanaan pendidikan di Indonesia lebih merata dan berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang lokasi geografis mereka, akan menerima pendidikan berkualitas yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). *Ekonomi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, T. (2023). *Manajemen Dana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Moeliodihardjo, B. (2018). *Pembangunan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, S. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana, D. (2020). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharsaputra, U. (2020). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.